

Bro 2970
8

**Madju Terus
Menggempur
Imperialisme
dan
Feodalisme !**

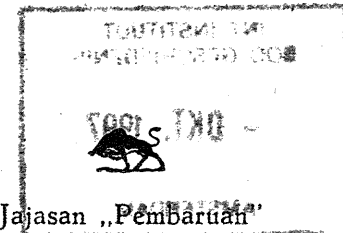
Sidang Pleno ke-II
CC PKI



Madju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!

(Sidang Pleno ke-II CC PKI,
achir Desember 1960)

Joop Morriën
Amsterdam



Jajasan „Pembaruan“
Djakarta 1961

INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS

- OKT. 1997

AMSTERDAM

10786921

Madju Terus Menggempur Imperialisme Dan Feodalisme !

/D.N. Aidit

Kawan² !

Sidang CC jang kita langsungkan sekarang adalah Sidang Pleno Ke-2 sesudah Kongres Nasional ke-VI Partai dalam bulan September 1959. Selama setahun lebih sedjak Kongres jang bersedjarah ini, seluruh barisan Partai telah bekerdja dengan didjiwai, didorong dan dipimpin oleh keputusan² Kongres tersebut.

Makin setia, g²igih dan pandai kita mendjalankan keputusan² Kongres Nasional ke-VI, makin banjak sukses jang didapat oleh Partai dan Rakjat pekerdja negeri kita, sekalipun banjak kesulitan dan rintangan jang kita hadapi. Demikian pengalaman kita dalam masa setahun lebih ini.

Periode jang ditindjau sekarang ditandai oleh pergulatan antara golongan jang mendukung dan golongan jang menolak Manifesto Politik, jaitu pidato bersedjarah Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan perintjiannja jang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Agung, jang baru² ini sudah diperkuat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebagai Garis² Besar Haluan Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik itu seluruh kekuatan revolusioner jang berporoskan NASA-KOM, jaitu golongan² politik Nasionalis, Agama dan Komunis, telah mengadakan ofensif dari atas dan dari bawah terhadap sisa² kolonialisme dan golongan² reaksioner lainnja. Kita kaum Komunis bersama dengan

kaum progresif lainnja berdiri dibarisan depan dalam pelaksanaan Manipol baik didalam kata² maupun didalam perbuatan. Partai kita mendidik anggota²nja supaya menjadi pendukung² jang paling berpengertian, paling sadar dan paling konsekwen daripada Manipol.

Golongan jang menolak dan menentang pelaksanaan Manipol, tadinja dipelopori oleh Masjumi-PSI dan „Liga Demokrasi”. Sesuai dengan kehendak Rakjat terbanyak partai² kepalabatu Masjumi-PSI telah dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Bubarnya partai² jang paling kanan ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan nasional kita.

Sedjalan dengan arah jang digariskan didalam Manipol, situasi politik dinegeri kita pada pokoknja terus bergeser kekiri, meskipun menghadapi banjak kesulitan, rintangan dan kerumitan.

Dimasa lampau partai² kanan jang sudah dibubarkan oleh Presiden itu memegang posisi² penting dalam badan² pemerintahan, dalam kehidupan ekonomi dan politik, di-perguruan² tinggi dan lembaga² negara lainnja. Mereka gunakan posisi² penting mereka ini untuk melumpuhkan segala usaha jang bersifat madju, untuk menjebarkan pesimisme dan sinisme, terutama dikalangan generasi muda. Mereka telah membikin busuk bagian² dari organisme nasional Republik Indonesia. Perbuatan² mereka ini merusak aparat Republik Indonesia, mengatjaukan perekonomian negeri, memetjahbelah persatuan nasional dan melemahkan semangat perjuangan Rakjat.

Karena basis sosialnja, jaitu imperialisme, feodalisme, kompradorisme dan belakangan ini ditambah lagi dengan kapitalisme birokrasi, belum lagi hantjur, kekuatan kanan tidak menjadi hilang sekaligus dengan dibubarkannya Masjumi-PSI dan matinja „Liga Demokrasi”. Disekitar Indonesia masih terdapat negara² persekutuan SEATO atau negara² jang dalam bentuk lain masih dikuasai oleh kaum imperialis. Di Irian Barat kolonialis-

me Belanda masih meradjalela. Semuanya ini membikin kita harus tetap waspada dan terus berlawan terhadap agen² politik kaum imperialis, kaum feodalis dan kaum kapitalis birokrat.

Kaum kanan lama jang berbadju Masjumi-PSI dan „Liga Demokrasi” memang sudah tidak ada lagi, tetapi mereka bisa dan sudah mengganti badjunja jang kotor itu. Disamping itu sjarat² objektif untuk timbulnja kaum kanan baru masih tjukup kuat.

Dalam rangka pelaksanaan Manipol, kaum kanan baru mentjoba mengabui mata Rakjat dengan ber-pura² menjetudjui Manipol-Usdek dalam kata², tetapi seluruh kekuatan mereka ditudjukan untuk mensabot pelaksanaannya, terutama dengan menentang NASAKOM dan menentang kegotongrojongan nasional pada umumnya. Sama dengan kaum kanan lama, kaum kanan baru djuga mengadakan indoktrinasi anti-Komunis, jang berarti anti-NASAKOM dan anti-persatuan nasional.

Kita harus dengan sekuat tenaga berusaha mempersatukan seluruh Rakjat, mempersatukan semua jang dapat dipersatukan untuk pelaksanaan Manipol, tetapi bersamaan dengan itu, djika kita tidak mau gagal, kita djuga harus dengan sekuat tenaga menelandjangi dan menjerang musuh² dalam selimut jang anti-nasional dan anti-Rakjat.

Sukses² jang ditjapai oleh Partai dan Rakjat telah membikin beringas kaum imperialis dan kaum kanan, baik jang lama maupun jang baru. Mereka telah menimbulkan berbagai kesulitan pada Partai kita, partai² demokratis lainnja dan Rakjat. Tindakan² mereka di-bidang ekonomi lebih membikin buruk keadaan ekonomi jang memang sudah tidak baik, lebih memerosotkan tingkat hidup Rakjat, merongrong ekonomi sektor negara, menghalangi dan menjelewengkan perkembangan koperasi. Di Universitas² kaum kanan sangat aktif, antara lain berusaha memberikan interpretasi mengenai Pantjasila jang bertentangan dengan pidato Presiden

Sukarno „Lahirnja Pantjasila” pada 1 Djuni 1945 dan memberikan interpretasi „Manipol” yang bertentangan dengan Manipol dan perintjiannja. Dalam kematagelapannja mereka memfitnah kita, sengadja mensalah-tafsirkan kritik² Partai kita yang konstruktif, berusaha merampas kemenangan² yang sudah ditjapai oleh Rakjat dan mentjegah kemenangan² Rakjat yang baru. Kader² Partai kita dengan gagahberani dan gigih berdjuaug mengatasi kesulitan² itu, ada yang sudah teratasi, ada yang belum dan mungkin masih banjak yang akan timbul. Semuanja ini lebih mejakinkan kita lagi akan benar-nja keputusan² Kongres Partai yang lalu, mendorong seluruh barisan Partai kita untuk lebih dalam mempelajari keputusan² tersebut dan untuk lebih tekun dan gairah melaksanakannja. Ini adalah sikap satu²nja yang tepat dari tiap² Komunis terhadap keputusan² Kongres-nja dan terhadap gangguan² kaum reaksioner. Yang menghadapi kesulitan dinegeri kita bukan hanya kaum Komunis, tetapi lebih² lagi kaum imperialis dan tuan-tanah serta kakitangan²nja dalam usaha mereka mempertahankan kedudukannja. Kemenangan hanya bagi mereka yang ulet !

Pantang mundur dan tidak kenal menjerah dalam membela apa sadja yang baik untuk Rakjat, tanahair dan Partai, inilah tekad Komunis dalam menghadapi segala kesulitan.

Sidang Pleno CC kita kali ini dilangsungkan dengan didjiwai oleh dua kemenangan besar, kemenangan nasional dan kemenangan internasional.

Kemenangan pertama, ialah kemenangan Rakjat Indonesia berhubung telah ditetapkannja dengan suara bulat oleh MPRS Garis² Besar Haluan Negara dan Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969. *Kemenangan kedua*, ialah kemenangan gerakan Komunis sedunia dengan adanya Pernjataan para wakil Partai Komunis dan Buruh beserta Seruannja kepada Rakjat² diseluruh dunia yang

dengan suara bulat dikumandangkan oleh 81 Partai Komunis dan Buruh, mewakili 36 djuta Komunis dari 5 benua dalam bulan November yang baru lalu.

Kemenangan pertama akan sangat memperkuat per-djuangan Rakjat Indonesia untuk melikwidasi imperialisme dan sisa² feodalisme dinegeri kita, untuk membangun kehidupan demokratis yang berpemerintahan kegotongrojongan nasional dan berharidepan Sosialisme.

Sedangkan mengenai kemenangan kedua, Pernjataan dan Seruan tersebut akan mempunjai peranan besar yang mendorong dan memimpin perdjuaug untuk mentjapai tudjuan² yang dihadapi oleh kaum Komunis, klas buruh, seluruh Rakjat pekerdja, semua kekuatan progresif disemua negeri. Dokumen² ini merupakan demonstrasi daripada persatuan yang taktergojahkan dari gerakan Komunis sedunia, dan merupakan hasil gemilang daripada diskusi yang demokratis. Ini adalah pentrapan Marxisme-Leninisme setjara kreatif dan zenial dalam situasi dunia sekarang. Kedua dokumen ini akan memobilisasi lebih baik Rakjat diseluruh dunia untuk perdamaian, pembebasan nasional, perbaikan tingkat hidup, demokrasi dan Sosialisme. Ide² yang mulia dalam dokumen² ini akan mengilhami kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia untuk lebih sengit berdjuaug membebaskan Irian Barat, melikwidasi imperialisme dan feodalisme, dan untuk perdamaian di Asia dan didunia.

Mengenai Pernjataan para wakil Partai Komunis dan Buruh serta Seruannja kepada Rakjat² diseluruh dunia itu, saja usulkan supaja sidang Pleno ke-2 CC ini mendengarkan laporan Kawan M. H. Lukman dan mendiskusikan isi kedua dokumen tersebut setjara mendalam serta membikin resolusi yang memuat sikap kita yang djelas menerima dua dokumen bersedjarah dan yang akan membikin sedjarah ini.

Mengenai ketetapan² MPRS yang diterima baik oleh Partai kita itu, akan saja uraikan lebih landjut dalam laporan ini.

Sidang Pleno ke-2 CC ini dilangsungkan juga untuk mendiskusikan sikap Partai mengenai „*Penetapan Presiden no. 7 tahun 1959 tentang sjarat² dan penjederhanaan kepartaian*” dan „*Peraturan Presiden no. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai²*”, jang antara lain mewajibkan partai² „*menjesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing², dengan ketentuan fasal 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden no. 7 tahun 1959*”.

Sebagaimana kawan² ketahui, Politbiro sudah menjatakan persetudjuannya dengan Penpres no. 7/1959 dan Perpres 13/1960 berdasarkan Resolusi Kongres Nasional ke-VI PKI tentang „*PKI menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk memperkuat front nasional dan menjtajapai masjarakat jang adil dan makmur*”. Dari sikap ini djelas bahwa Partai kita, disamping tetap memiliki dan mempertahankan kebebasannya dengan teguh, mementingkan sungguh² persatuan nasional untuk menjelaskan tuntutan² Revolusi Agustus 1945. Saja usulkan supaja Sidang Pleno ke-2 CC ini, disamping memperkuat sikap jang sudah diambil oleh Politbiro, djuga merumuskan amandemen² terhadap Konstitusi Partai untuk memenuhi Penpres no. 7/1959.

SEBAB²NJA PKI MENERIMA GARIS² BESAR HALUAN NEGARA DAN GARIS² BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jaitu dewan tertinggi dalam Republik Indonesia, dalam sidang pertamanya jang berlangsung dari tanggal 10 November sampai dengan 7 Desember 1960 telah dengan setjara aklamasi mengambil dua buah ketetapan jang sangat penting dan akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan politik dinegeri kita. Peristiwa ini bukanlah hanja merupakan kemenangan satu golongan atau satu partai tetapi kemenangan bagi seluruh bangsa. Oleh

karena itu, ketetapan² ini harus pula dilaksanakan oleh seluruh bangsa, seluruh Rakjat Indonesia.

Jang pertama jalah ketetapan tentang Manifesto Politik Republik Indonesia serta perintjiannya sebagai Garis² Besar Haluan Negara, dan jang kedua ketetapan tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional.

Ketetapan pertama tidak hanja telah memperkuat Garis² Besar Haluan Negara, tetapi djuga termasuk didalamnya menetapkan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana tertanggal 28 Agustus 1959 sebagai Garis² Besar Haluan Pembangunan, dan menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 „*Djalannya Revolusi Kita*” (Djarek) serta Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum PBB jang berdjulul „*Membangun Dunia Kembali*” sebagai pedoman² pelaksanaan Manipol.

Seperti sudah djatakan oleh tokoh² Komunis baik didalam maupun diluar MPRS, PKI menerima ketetapan pertama MPRS, karena Manipol dan perintjiannya sebagai Garis² Besar Haluan Negara memuat masalah² penting dan pokok daripada revolusi Indonesia. Garis² Besar Haluan Negara ini menjelaskan, bahwa jang menjadi sasaran² pokok (musuh² pokok) revolusi Indonesia jalah imperialisme dan feodalisme; bahwa tugas² revolusi Indonesia bukanlah mendirikan kekuasaan politik satu klas, satu golongan atau satu partai, tetapi kekuasaan politik seluruh Rakjat, kekuasaan Gotong Rojong, menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan; bahwa kekuatan² pendorong (penggerak) revolusi Indonesia bukanlah satu klas, satu golongan atau satu partai tetapi seluruh Rakjat Indonesia jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknya; bahwa watak (sifat) revolusi Indonesia adalah nasional-demokratis; dan bahwa hari-depan (perspektif) revolusi Indonesia adalah Sosialisme, bukan kapitalisme.

Pembangunan yang berdasarkan Garis² Besar Haluan Pembangunan adalah pembangunan yang diabdikan kepada revolusi Indonesia yang wataknya seperti tersebut diatas. Garis kebidjaksanaan politik seperti yang tertjantum dalam „Djarek” serta dasar dan kebidjaksanaan politik luarnegeri seperti yang tertjantum dalam „Membangun Dunia Kembali” mentjerminkan semangat revolusioner Rakjat Indonesia.

PKI berpendapat bahwa Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional menurut ketetapan nomor II MPRS sampai batas² tertentu sesuai dengan watak revolusi Indonesia yang nasional dan demokratis, yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, jaitu *tidak mementingkan investasi modal asing, mementingkan „landreform” dan pertanian, mementingkan industrialisasi dan industri berat, dan menempatkan ekonomi sektor negara pada kedudukan memimpin perekonomian negeri.*

PKI menerima Garis² Besar Haluan Negara sebagai *garis besar politik bersama* dan menerima Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional sebagai *program bersama* untuk dilaksanakan oleh seluruh bangsa.

SJARAT² PELAKSANAAN

Kaum birokrat dan orang² yang tidak kreatif lainnja berkata, bahwa Pola Pembangunan 8 Tahun ini tidak mungkin dilaksanakan, karena mereka tidak mempunyai gambaran dari mana modal akan didapat, apalagi jika tanpa investasi modal asing. Padahal, pembangunan dengan investasi modal asing adalah bertentangan dengan watak revolusi Indonesia dan bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakjat, karena djustru investasi modal asinglah yang telah membikin Rakjat Indonesia ber-abad² hidup dalam papa sengsara, membikin Rakjat Indonesia dihisap, dan hasil keringatnja serta hasil kekayaan alamnja diangkut keluar negeri untuk memperkaya orang² yang sudah kaya.

Kebalikannja dari orang² birokrat dan orang² yang tidak kreatif pada umumnja, Presiden Sukarno dengan kaum progresif dan seluruh Rakjat pekerdja Indonesia, mempunyai kejakinan bahwa Pola Pembangunan tahapan pertama ini akan dapat dilaksanakan asal dipenuhi sjarat² tertentu.

Dari mana modal didapat ? MPRS telah menundjukkan djalan. Per-tama² dari dalam negeri, jaitu dari kekayaan alam Indonesia yang me-limpah², dari keradjinan dan ketjerdasan berfikir Rakjat Indonesia. Djika masih kurang, memindjam wang dan ahli dari negeri² yang memang berkemauan baik terhadap pembangunan Indonesia.

Faktor pertama untuk melaksanakan Pola Pembangunan adalah Rakjat Indonesia sendiri. Soalnja bagaimana membangunkan kekuatan raksasa Rakjat Indonesia yang belum tergugah ini.

Selain daripada itu, setelah garis politik tepat dengan adanya Garis² Besar Haluan Negara dan Garis² Besar Pola Pembangunan, maka untuk suksesnja pelaksanaan, mendjadi mahapentinglah soal organisasi dan kader. Untuk ini dan untuk membangunkan kekuatan raksasa Rakjat yang belum tergugah, soal² dibawah ini adalah mutlak :

Pertama, harus ada persatuan nasional revolusioner yang lebih kuat, kontradiksi² yang tidak perlu dikalangan Rakjat harus setjara maximal dikurangi. Untuk ini pengalaman bekerdja tjepat dan tepat dari MPRS baik didjadikan tjontoh. Ini dimungkinkan karena prinsip gotongrojong NASAKOM dengan karja dilaksanakan setjara konsekwen. Penjesuaian seluruh aparatur negara seperti yang dituntut oleh MPRS harus dengan konsekwen berpegang pada prinsip ini. Djuga pimpinan Front Nasional, yang akan memegang peranan penting dalam mengorganisasi dan memobilisasi Rakjat harus dengan teguh berpegang pada prinsip gotongrojong ini, mulai

dari pimpinan yang paling atas sampai pimpinan yang paling bawah.

Kedua, harus dilaksanakan dengan sungguh² diperkuatnya ekonomi sektor negara dengan mentjegah setiap usaha mempartikelirkan perusahaan² vital yang sudah dikuasai negara. Semua perusahaan Belanda yang sudah dan belum diambilalih supaya dinasionalisasi tanpa ganti kerugian karena tindakan agresi Belanda terhadap Irian Barat. Pengusahaan semua perusahaan negara supaya diintensifkan dengan memperbaiki pengurusan (management) dan mengikutsertakan wakil² serikatburuh dalam Dewan² Perusahaan. Mengurangi keuntungan modal monopoli asing yang masih ada, mengambilalih modal monopoli asing yang memusuhi Republik Indonesia, membatalkan Undang² Penanaman Modal Asing, dan mengembangkan hubungan ekonomi internasional yang tidak berat sebelah untuk memajukan pembangunan industri negara. Dajabeli Rakjat pekerdja harus dipertinggi dengan djalan mentjegah kenaikan harga barang² dan tarif² dan mempertinggi penghasilanja. Melaksanakan perubahan-tanah („landreform“) dengan sungguh², dengan tudjuan membebaskan kaum tani dari ikatan² hubungan produksi feodal. Hanja djika kaum tani sudah bebas samasekali dari perhambaan feodal, mempunjai tanah sebagai miliknya sendiri untuk digarap dan diambil hasilnja sendiri, barulah mereka bisa mengerdjakan tanah dengan lebih produktif dan lebih intensif, dan dengan demikian mereka menjadi tenaga pembangunan dan sumber modal yang sangat besar.

Ketiga, antusiasme harus ditingkatkan terusmenerus, semangat harus terus dipertinggi. Ini hanja mungkin djika kebebasan demokratis, chususnya kebebasan berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat setjara lisan dan tulisan diberikan seluas-luasnja kepada Rakjat revolusioner. Untuk ini berlakunja Undang² Keadaan Bahaja harus ditindjau. Sebaliknya hak² politik tidak

diberikan kepada kaum reaksioner yang menentang Garis² Besar Haluan Negara. Kritik² yang konstruktif harus diusahakan supaya datang dari Rakjat dan disalurkan, karena dari kritik² Rakjat bisa timbul fikiran² baru untuk memperbaiki pekerdjaan. Untuk mentjegah kerugian² keuangan dan kekajaan negara yang lebih banyak serta untuk menimbulkan kegembiraan bekerdja dikalangan kaum buruh dan pegawai, harus diberantas dengan sungguh² birokrasi, korupsi dan pemborosan. Demikian pula harus dihentikan semua kegiatan yang memusuhi serikatburuh, terutama kegiatan mendirikan serikatburuh² palsu.

Keempat, harus diadakan gerakan penerangan besar² an diseluruh negeri oleh fihak resmi ber-sama² dengan organisasi² Rakjat mengenai Garis² Besar Haluan Negara dan Garis² Besar Pola Pembangunan. Supaja diadakan gerakan mendiskusikan Pola Pembangunan dengan tudjuan untuk melaksanakan projek² lebih tjepat dari waktu yang sudah ditentukan. Kompetisi² harus diorganisasi dan hadiah² dibagikan kepada pahlawan² kerdja, baik pekerdja² atasan maupun bawahan.

Kelima, pendidikan kader² pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang menghendaki ketjepatan, dengan memperhebat pendidikan kader didalamnegeri disamping mengirimkan sebanyak mungkin patriot untuk beladjar diluarnegeri. Disamping harus ahli, kader² pembangunan harus pula yang kuat bersemangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan yang ber-tjita² Sosialisme, jaitu ber-tjita² hapusnja penghisapan atas manusia oleh manusia. Singkatnja, kader² pembangunan kita haruslah patriot dan demokrat yang ber-tjita² Sosialisme.

Hanja dengan dipenuhinja sjarat² organisasi dan manusia pelaksana seperti tersebut diatas, Garis² Besar Haluan Negara dapat berdjalan dengan baik dan Garis² Besar Pola Pembangunan dapat dilaksanakan.

Tugas Partai dan organisasi² Rakjat revolusioner

lainnja adalah memperdjuangkan dengan ulet, gigih dan pandai agar sjarat² pelaksanaan tersebut dapat dipenuhi dengan bersandar pada aksi² massa buruh, tani dan Rakjat pekerdja lainnja, mengingat kenjataan² bahwa ekonomi Indonesia masih bersifat kolonial, belum bersihnja aparatur negara dari anasir² korup dan reaksioner serta belum adanja wakil² buruh jang sedjati dalam Pemerintahan. Kongres Nasional ke-VI PKI telah menjatakan pendirian kaum Komunis, bahwa usaha² untuk mengatasi krisis ekonomi jang mentjengkram Indonesia tidak bisa dipisahkan dari usaha² pemulihan keamanan se-tjepat²nja, melaksanakan Konsepsi Presiden tahun 1957 dan dengan perdjuangan menghabisi sisa² kekuasaan kolonial Belanda dan melawan intervensi imperialis Amerika Serikat disegala bidang.

DENGAN TRIPANDJI MENERUSKAN PERDJU- ANGAN ANTI-IMPERIALISME DAN ANTI-FEODALISME

Berdasarkan keputusan² Kongres Nasional ke-VI Partai kita telah menetapkan Garis Umum, jaitu : *meneruskan penggalangan front nasional dan meneruskan pembangunan Partai untuk menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja*. Garis Umum ini telah mendorong dan memimpin semua aktivitet anggota Partai kita dalam mengabdikan diri pada Rakjat, tanahair dan Partai.

Berdasarkan Garis Umum Partai kita telah mengibarkan tripandji (tiga bendera) jaitu (1) *Pandji Front Nasional*; (2) *Pandji Pembangunan Partai*; (3) *Pandji Revolusi Agustus 1945*.

Pandji front nasional harus kita kibarkan tinggi² karena kita sadar bahwa Revolusi kita hanya dapat dimenangkan oleh suatu front nasional, jaitu front daripada semua klas dan golongan revolusioner. Kita telah mentjapai hasil² tertentu jang menggembirakan dalam

menggalang front nasional. Pada waktu² belakangan ini penghimpunan daripada semua kekuatan revolusioner oleh Presiden Sukarno diberi bentuk jang chas, jaitu persatuan NASAKOM, persatuan antara golongan² politik Nasionalis, Agama dan Komunis. Ini merupakan kemadjuan jang penting dalam penggalangan persatuan Rakjat Indonesia, dan akan sangat membantu dalam mentjiptakan persatuan Rakjat jang riil. Ketakutan setengah mati kaum imperialis dan kaum kanan pada NASAKOM adalah bukti benarnja politik persatuan NASAKOM sebagai politik revolusioner.

Tetapi, kaum progresif harus melihat masalah front nasional lebih djauh dan lebih dalam lagi. Front nasional jang riil, kuat dan takterkalahkan hanya dapat diwujudkan djika massa Rakjat jang luas ikutserta dan aktif didalamnya. Bagian jang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia adalah kaum buruh dan kaum tani. Oleh karena itulah, front nasional jang kuat hanyalah front nasional jang berbasiskan persekutuan erat antara kaum buruh dan kaum tani, tentu dengan tidak mengabaikan artipenting daripada golongan² Rakjat revolusioner lainnja. Front nasional tidak akan mempunyai kekuatan, dan malahan bisa hanya menjadi sembojan kosong belaka, djika tidak berbasiskan persekutuan buruh dan tani.

Mengibarkan tinggi² pandji front nasional pada waktu sekarang bagi kaum Komunis berarti memperkuat persatuan NASAKOM, dan berarti bekerja lebih keras serta lebih teratur dikalangan kaum tani.

Dengan perasaan gembira dapat saja laporkan kepada sidang CC ini, bahwa sedjak Kongres Nasional ke-VI berbagai kemadjuan telah ditjapai oleh Partai kita dalam bekerja dikalangan kaum tani. Dengan tidak mengenal lelah kader² Partai masuk desa keluar desa, berada di-tengah² kaum tani untuk membantu mengorganisasi kaum tani dan melahirkan kader² dari kalangan kaum tani sendiri, dan untuk mengadakan penelitian (research) mengenai hubungan agraria dan

penghidupan kaum tani. Sudah agak banyak kader² kota yang mulai senang dan gembira bekerdja didesa. Hasil yang menggembirakan ini adalah djuga berkat dilaksanakannya gerakan mempeladjar brosur² penting tentang bekerdja dikalangan kaum tani.

Berdasarkan pengalaman sendiri dalam gerakan tani, umumnja kader² Partai sudah sadar bahwa dalam keadaan bagaimanapun Partai harus selalu bersandar pada buruhtani dan tanimiskin. Tanpa sandaran ini gerakan tani tidak bisa berkembang dan tidak bisa konsekwen. Dengan gerakan tani yang tidak berkembang dan tidak konsekwen tidak mungkin ada front nasional anti-imperialis yang luas dan konsekwen. Pada waktu sekarang adalah kewadajiban yang sangat penting dari Partai kita untuk, disamping terus mengembangkan gerakan tani, djuga menjimpulkan setjara tepat dan menjeluruh pengalaman² terachir daripada pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani.

Satu hal yang akan membantu gerakan tani Indonesia ialah, bahwa politik perubahan tanah („landreform“) sudah mendjadi politik resmi Pemerintah. Sampai dimana politik ini bisa didjalankan dengan konsekwen dan menguntungkan kaum tani, terutama kaum buruhtani dan tanimiskin, sangat tergantung pada tingkat kesadaran berorganisasi dan kesadaran politik kaum tani. Gerakan tani Revolusioner harus membantu Pemerintah agar politik perubahan tanah Pemerintah didjalankan dengan konsekwen sesuai dengan isi pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yang antara lain sebagai berikut : „Tanah untuk Tani ! Tanah untuk mereka yang betul² menggarap tanah ! Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk onggang² mendjadi gemuk-gendut karena penghisapan keringatnja orang² yang di-suruh menggarap tanah itu !”

Tidak ada satupun undang² atau peraturan yang madya bisa berdjalan baik djika Rakjat sendiri tidak berdjua mati²an untuk pelaksanaannja. Oleh karena itu,

perubahan tanah hanja bisa terlaksana djika didjalankan berdasarkan prinsip „kaum tani sendiri membebaskan diri dari tuantanah“, artinja tidak ada yang dapat membebaskan kaum tani ketjuali kaum tani sendiri. Hanja djika prinsip ini dilaksanakan dengan konsekwen, perubahan tanah dapat didjalankan dan kelanjutan daripadnja, misalnja soal pengkoperasian kaum tani, akan berdjalan diatas rel revolusioner dan dengan pimpinan revolusioner. Djuga Undang² Perdjudjian Bagi Hasil hanja dapat dilaksanakan djika kaum tani sendiri bangkit untuk pelaksanaannja. Kebangkitan kaum buruhtani dan tanimiskin untuk pelaksanaan Undang² Perdjudjian Bagi Hasil akan mempunyai arti yang sangat penting untuk pelaksanaan perubahan tanah.

Dengan mementingkan pekerdjaan dikalangan kaum tani dalam rangka memperkuat front nasional, tidaklah berarti bahwa pekerdjaan dikalangan kaum buruh, burdjuasi ketjil kota, kaum intelektuil pekerdja dan golongan Rakjat pekerdja lainnja boleh diremehkan.

Dalam hubungan dengan pekerdjaan front nasional, masih perlu rasanja diingatkan kepada seluruh barisan Partai kita, bahwa pekerdjaan ini kita lakukan dalam rangka menjelesaikan tugas nasional kita. Tugas nasional kita pada hakekatnja ialah tugas menjelesaikan kontradiksi terpokok pada waktu sekarang, jaitu kontradiksi antara nasion Indonesia dengan kaum imperialis asing, seperti misalnja tugas membebaskan Irian Barat, melawan subversi dan intervensi asing, melawan usaha² yang mau memasukkan Indonesia kedalam pakta militer, melawan kapitalis monopoli asing yang masih ada di-negeri kita dan menentang investasi modal asing baru, pendeknja melawan musuh² dari luar. Dalam perdjuaan melawan musuh² dari luar ini, perdjuaan klas kita muntjul dalam bentuk perdjuaan nasional.

Prinsip pokok yang harus kita pegang dalam melakukan perdjuaan nasional ialah meletakkan perdjuaan klas dibawah perdjuaan nasional. Dalam melaksana-

kan prinsip inilah kita mempertahankan kebebasan Partai dan kelas kita. *Hanya dengan meletakkan kepentingan kelas dan Partai dibawah kepentingan nasional, yaitu kepentingan seluruh Rakyat revolusioner, dan mempertahankan setjara tahu batas kepentingan kelas dan Partai, kerdjasama kita dengan kelas² dan golongan² lain dapat menguntungkan dan kerdjasama dapat ditjapai.*

Pandji pembangunan Partai harus kita kibarkan tinggi² dengan tudjuan menjempurnakan pembangunan Partai diseluruh negeri, Partai yang mempunjai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.

Dalam rangka kewadajiban mengkonsolidasi Partai, Kongres kita yang lalu telah memberi petunjuk yang djelas tentang bagaimana pendidikan Marxisme-Leninisme harus dilakukan, tentang tjara memerangi subjektivisme didalam Partai, tentang bekerdja dengan plan 3 tahun, tentang menjesuaikan organisasi dengan situasi, tentang atasan memberi tjontoh pada bawahan, tentang mengeratkan hubungan Partai dengan massa dan bagaimana Partai memimpin massa. Keputusan² Kongres yang lalu tentang pembangunan Partai adalah sangat penting dan lengkap, oleh karena itu harus dipahami dan diamalkan dengan sungguh² oleh seluruh barisan Partai kita.

Pada kesempatan ini ~~saja~~ ingin mengingatkan kepada salahsatu bagian daripada keputusan² Kongres berhubungan dengan soal pembangunan Partai yang pada waktu sekarang harus dengan sepenuh hati mendapat perhatian kita. Yang saya maksudkan ialah kalimat sebagai berikut :

„Kenjataan pada waktu sekarang ialah, bahwa kaum reaksioner sukar memukul politik Partai, karena begitu satunja politik Partai dengan kepentingan² ekonomi dan politik yang langsung daripada massa Rakyat dan dengan kepentingan² nasional. Mereka djuga sukar menjerang program Partai, karena menjerang ini berarti

menjerang kepentingan vital daripada Rakyat dan bangsa.

„Oleh karena itu mereka lebih banjak mentjuraikkan kegiatannya dalam gelanggang ideologi, dimana mereka setjara diam² menjelundupkan pandangan² dunia idealis dalam mendjelaskan masalah² politik, hukum, kesenian, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kekatjauan dalam dunia ideologi. Dengan demikian mereka berharap dapat menghalang-halangi kemajuan gerakan progresif, kemajuan perdjuaan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnya.

„Dalam filsafat, kaum imperialis dan kakitangannya serta kaum burdjuis dalam negeri pada hakekatnya berada dalam satu front dan sangat aktif menjerang benteng filsafat kelas buruh. Menghadapi serangan frontal dilapangan filsafat ini adalah keliru sekali untuk bersikap pasif, karena ini berarti membiarkan benteng filsafat kelas buruh dimasuki dan diobrak-abrik oleh elemen² perusak, yang akan melemahkan semua bidang kegiatan gerakan buruh dan gerakan Rakyat pekerdja pada umumnya”.

Apalagi sesudah MPRS mensahkan Garis² Besar Haluan Negara dan Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional yang disokong oleh Partai kita karena banjak persesuaiannya dengan program tuntutan dan program umum Partai, maka akan lebih sukar lagi bagi kaum reaksioner untuk menjerang Partai dari segi politik. Oleh karena itu kaum imperialis, kaum revisionis modern dan kaum reaksioner pada umumnya akan lebih banjak lagi menjerang Partai dan gerakan massa difront ideologi, terutama dari segi filsafat untuk menimbulkan keruwetan² fikiran didalam Partai dan untuk memperbudak Rakyat setjara spirituil.

Semuanya ini mengharuskan kita untuk lebih² lagi memberikan tekanan dalam hal pembangunan Partai pada memperkuat ideologi anggota² Partai, khususnya dengan lebih mengutamakan peladjaran filsafat

Marxisme-Leninisme, jaitu materialisme dialektik dan histori. Pengalaman² makin banjak membuktikan benarnya apa jang dinjatakan oleh Kongres kita jang lalu, jaitu bahwa djika filsafat dipeladjar sebagaimana mestinja, jaitu dihubungkan dengan praktek kehidupan, dengan kenyataan², dengan dokumen² Partai, dengan garis umum dan politik se-hari² daripada Partai, maka tidak akan timbul kesulitan² besar pada anggota² biasa daripada Partai jang memang suka beladjar dan telah mempertinggi kemampuan bekerdja kader² Partai.

Pada waktu sekarang perkataan „sosialisme” sudah diutjapkan oleh siapa saja dinegeri kita. Banjak orang² baik dan dengan maksud baik berbitjara tentang „sosialisme” atau „sosialisme Indonesia”. Tetapi, disamping itu djuga bekas² ambtenar kolonial dan orang reaksioner lainnja jang berkepalabatu anti-Komunis berbitjara tentang „sosialisme”. Jang belakangan ini dengan tudjuan menipu Rakjat, mengatjaukan fikiran Rakjat, dan dengan maksud bersembunji dibelakang Presiden Sukarno guna meneruskan praktek²nja mendiegal gerakan revolusioner dan demokratis. Agar massa Rakjat dan anggota² Partai tidak tertipu oleh „sosialisme” palsu dari kaum reaksioner, maka pendidikan tentang soal² pokok Revolusi Indonesia harus lebih diperhebat, baik didalam Partai maupun dikalangan massa Rakjat diluar Partai. Tekanan dalam pendidikan mengenai soal² pokok revolusi Indonesia harus diberikan pada watak revolusi. Sosialisme harus ditegaskan sebagai perspektif revolusi dan hakekat daripada Sosialisme ialah penghapusan penghisapan atas manusia oleh manusia.

Kawan², setelah garis politik dan garis organisasi Partai tepat, seperti jang sudah digariskan oleh Kongres Nasional kita jang terachir, maka jang menentukan sukses² Partai sekarang adalah kader, jaitu pelaksana paling sedar daripada garis politik dan garis organisasi Partai.

Partai kita hanya bisa menunaikan tugas sedjarahnja apabila kita mempunjai sedjumlah besar kader pimpinan jang dapat memperpadukan kepandaian dan watak.

Terutama sedjak pembangunan Partai kembali dalam tahun 1951, kita telah mendidik sedjumlah pemimpin jang kompeten, dan karena itu anggota² Partai kita jang banjak djumlahnja itu sekarang telah mempunjai tulangpunggung atau teras disemua bidang seperti bidang politik, ekonomi dan kebudayaan, dibidang pekerdjaan Partai dan pekerdjaan massa. Ini adalah kedjaan bagi Partai dan bangsa kita. Tetapi tulangpunggung jang sudah ada sekarang belum tjukup kuat untuk mendukung perdjjuangan kita jang besar. Oleh karena itu kita masih harus mentjetak banjak orang² jang tjakap dan berwatak.

Dengan meningkatnja perdjjuangan revolusioner Rakjat Indonesia maka makin banjak muntjul orang² djudjur jang aktif. Mereka akan terus muntjul dari perdjjuangan besar Rakjat Indonesia. Kewadajiban kita ialah mengorganisasi mereka, memupuk mereka, memelihara mereka dan menggunakan mereka sebagaimana mestinja untuk perdjjuangan Rakjat dan Partai.

Tetapi kewadajiban kita bukanlah hanya memperhatikan kader² Partai. Kita djuga berkewadajiban memperhatikan kader² non-Partai dan kader² dari partai² demokratis lainnja. Kader² Komunis harus bekerdjasama dengan mereka, membantu mereka setjara ichlas dan sepenuh hati, bersikap hangat dan akrab terhadap mereka agar mereka ber-sama² dengan kaum Komunis memberikan seluruh enerzi mereka untuk melaksanakan Garis² Besar Haluan Negara (Manipol), untuk melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945.

Pada waktu sekarang masih ada pemimpin² dan Komite² Partai jang belum tepat menilai kader. Akibatnja ialah timbul berbagai kesalahan dalam menempatkan kader dan membikin para kader tidak bisa berkembang tjepat. Hal ini tidak boleh diteruskan. Tiap² pemimpin

1 dan Komite PKI harus mengetahui tjara (metode) prinsipil dalam menilai kader, yaitu : *Kita tidak boleh membatasi diri pada suatu pandangan mengenai satu masa pendek atau satu kejadian saja dalam kehidupan kader, akan tetapi kita juga harus memandang riwayat hidup serta pekerjaannya dalam keseluruhan.*

Kita harus tahu benar bagaimana *mempekerdjakan kader*². Kewajiban pimpinan pada pokoknya berkisar pada dua soal : *menunjukkan tjara dan mempekerdjakan kader.*

Apa yang dimaksudkan dengan „menunjukkan tjara“? Yang dimaksudkan dengan ini ialah soal² seperti membikin rentjana² serta keputusan², memberi instruksi² serta petunjuk². Agar dapat melaksanakan semua „tjara“ itu maka kita harus mempersatukan para kader dan mendorong mereka supaya bekerja menurut tjara² itu. Mempersatukan para kader dan mendorong mereka supaya bekerja menurut tjara² yang sudah kita tentukan, inilah yang kita maksudkan dengan mempekerdjakan kader.

Dinegeri kita, terutama dalam administrasi negara, masih ada kebiasaan yang sangat djelek dalam mempekerdjakan kader, yaitu apa yang dinamakan „sistim kontjo“ atau „sistim famili“, artinya hanya mempekerdjakan kader² „yang dekat dan disajangi“. Ini adalah praktek yang tidak djudjur, peninggalan zaman kolonial, yang pada waktu sekarang masih tjukup banyak dilakukan orang dinegeri kita. Tjara mempekerdjakan kader sematjam ini tidak boleh terdjadi didalam Partai kita.

→ Bagaimana tjara yang tepat dalam mempekerdjakan kader? Yang tepat ialah melaksanakan garis „mempekerdjakan hanya mereka yang patut“. Dalam menetapkan seseorang kader itu patut atau tidak tentu tidak boleh dilakukan setjara subjektif. Kalau setjara subjektif maka ini sama dengan praktek tidak djudjur, yaitu mempekerdjakan kader² „yang dekat dan disajangi“. Oleh karena itu kita harus mempunyai patokan (krite-

rium) dalam politik kader kita. Patokan dalam politik kader kita ialah : *apakah seseorang kader tegas dalam melaksanakan garis Partai, mengindahkan disiplin Partai berhubungan erat dengan massa, mampu bekerja setjara taktergantung, aktif dan suka bekerja keras serta tak mementingkan diri sendiri.* Pimpinan Partai kita dari semua tingkat harus dengan teguh meneruskan praktek yang djudjur dan lajak dan menentang praktek yang tidak djudjur dan tidak lajak dalam mempekerdjakan kader. Dengan demikian kita memperkuat persatuan dan solidaritet diantara seluruh kader Partai, baik tua atau muda, baik lama atau baru, baik pria atau wanita, dari semua sukubangsa.

Setelah kita mempunyai patokan dalam politik kader, maka soal lebih lanjut ialah : bagaimana *memelihara kader*. Ada matjam² tjara memelihara kader, yaitu :

Pertama : memberi bimbingan kepada mereka. Ini berarti, bahwa disatu pihak kita memperbolehkan mereka bertindak setjara bebas dalam pekerjaan mereka sehingga mereka mempunyai keberanian untuk mengambil sendiri tanggungjawab, sedangkan difihak lain memberi petunjuk² kepada mereka tepat pada waktunya sehingga mereka dapat mengembangkan daya kreatifnya atas dasar garis politik Partai.

Kedua : meningkatkan mereka. Ini berarti meningkatkan pengertian teori dan kemampuan bekerja para kader dengan memberi kesempatan pada mereka untuk belajar dan mendidik mereka serta mempromosi mereka tepat pada waktunya.

Ketiga : mengontrol pekerjaan mereka. Ini berarti membantu mereka dalam menghidupkan badan kolektifnya, dalam menjimpulkan pengalaman²nya, menghargai hasil² pekerjaannya serta membetulkan kesalahan² mereka. Memberi pekerjaan pada kader² tanpa mengadakan kontrol terhadapnya, dan hanya memperhatikan mereka apabila mereka melakukan kesalahan² serius,

sudah barang tentu bukanlah tjara memelihara kader yang baik.

→ *Keempat: membetulkan kesalahan² mereka.* Kader yang membikin kesalahan² serius tidak boleh terus di-ketjam dan diberi tjap misalnja tjap „reaksioner“, „oportunis“, „kekiri-kirian“, dan sebagainya. Mereka yang sudah berbuat keliru harus dijakinkan dan dibantu memperbaiki kesalahan²nja. Kesabaran revolusioner diperlukan dalam memelihara kader. Hanja terhadap mereka yang membuat kesalahan serius dan tidak mau menerima bimbingan barulah dilakukan ketjaman, tetapi tetap dengan maksud untuk „mengobatinja“, bukan untuk „menjakitinja“.

→ *Kelima: membantu mereka.* Soal sakit, soal penghidupan, soal keluarga daripada kader tidak boleh dipandang sebagai soal prive se-mata². Kalau kader sakit, kalau penghidupannja terlalu susah, dan kalau kehidupan keluarganja morat-marit, maka kader yang demikian tidak mungkin bekerdja atau bekerdja baik untuk kepentingan Rakjat dan Partai. Oleh karena itu Partai harus turun-tangan, harus memberikan bantuan yang mungkin diberikan kepada para kader yang menghadapi kesulitan² dalam semangat solidaritet Komunis. Tentu sadja difihak lain, para kader harus pula mengerti bahwa kemampuan Partai masih sangat terbatas dalam memberikan bantuan yang bersifat materiil.

Demikian beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus dari Partai kita dalam melaksanakan tugasnja mengibarkan tinggi² pandji pembangunan Partai, jaitu lebih memperhebat peladjaran filsafat dan peladjaran tentang soal² pokok revolusi Indonesia, tjara prinsipiil menilai kader, menundjukkan tjara² dan mempekerdjakan kader, melaksanakan politik kader dan tjara memelihara kader yang tepat. Dalam waktu yang tidak lama kita harus dapat mentjiptakan banjak kader yang pandai bekerdja sendiri, yang kreatif dan berwatak klas yang teguh.

Jang terachir dan terpenting jalah, bahwa untuk dapat memupuk *sedjumlah besar* orang² yang pandai dan berwatak haruslah ada kehidupan demokratis didalam Partai, dan bersamaan dengan itu kehidupan demokratis dinegeri kita. Oleh sebab itu sangat pentinglah ditekankan pendidikan mengenai kehidupan demokratis didalam Partai agar anggota² mengerti apa itu kehidupan demokratis, bagaimana hubungannja antara demokrasi dan sentralisme dan bagaimana sentralisme-demokratis dapat diwujudkan. Hanja anggota² Partai yang mengerti benar tentang kehidupan demokratis didalam Partai bisa mendjadi pedjuang yang baik untuk kehidupan demokratis diluar Partai. Hanja dengan demikian kegiatan² pimpinan, kader² dan anggota² Partai dapat ditjurahkan sepenuhnya dalam melawan imperialisme dan sisa² feodalisme dinegeri kita, dalam melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia, dalam melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Pandji Revolusi Agustus 1945 harus kita kibarkan tinggi² untuk memanggil sebanjak mungkin Rakjat berkeliling disekitarnja dan berdjuaug untuk melaksanakan tuntutan²nja sampai ke-akar²nja, jaitu hapusnja sama-sekali imperialisme dan feodalisme di Indonesia sebagai sjarat yang tidak boleh tidak untuk menudju kemasjara-kat Sosialis dibumi Indonesia.

Kita kaum Komunis bukanlah pemotong sedjarah, dan oleh sebab itu, selama tuntutan² Revolusi Agustus 1945 belum terlaksana seluruhnja, kita tidak akan melepaskan bendera revolusi ini dari tangan kita.

Kongres Nasional ke-V PKI dalam tahun 1954 telah melengkapi dan merumuskan program² dan sembojan² yang tepat daripada Revolusi Agustus 1945. Sedjak kita mengibarkan tinggi² pandji revolusi ini dengan menuliskan program² dan sembojan² yang ilmiah diatasnja, sedjak itu Rakjat Indonesia makin teguh bersatu dan per-djuangannja madju dengan lebih tjepat dan lebih teratur.

Pengibaran tinggi² pandji Revolusi Agustus 1945 oleh Partai kita adalah bukti jang se-njata²nja bahwa Partai kita berdiri diatas dasar ilmu Marxisme-Leninisme jang sudah terudji, bahwa Partai kita setia pada Revolusi Rakjat jang telah dikorbani oleh ratusan ribu putera-puteri Indonesia jang baik, dan bahwa Partai kita berpantang mundur serta bertekad bulat untuk melenjapkan samasekali imperialisme dan feodalisme dinegeri kita, untuk membangun Indonesia Baru jang demokratis dimana sumber segala kekuasaan ada pada Rakjat.

PERSATUAN DAN KEMENANGAN

Program² dan sembojan² jang kita tuliskan pada pandji Revolusi Agustus 1945 makin lama makin mendapat pengakuan setjara nasional dan setjara resmi. Banjak diantaranya jang telah mendjadi keputusan² badan² kenegaraan, termasuk badan kenegaraan jang tertinggi, jaitu Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. Ini semuanja merupakan kemenangan politik jang besar bagi Rakjat Indonesia, karena hal ini akan sangat membantu dalam menggalang persatuan Rakjat jang lebih kuat.

Tetapi ada djarak jang djauh dan djurang jang dalam antara keputusan² badan² resmi dengan pelaksanaan daripada keputusan² itu. Untuk sampai kepada kenyataan, bahwa badan² legislatif dan eksekutif mengambil keputusan² jang sesuai dengan tuntutan² Rakjat, diperlukan perdjungan jang berat. Tetapi djauh lebih berat lagi perdjungan jang diperlukan untuk melaksanakan keputusan² jang baik itu. Djaminan satu²nja untuk ini hanyalah djika ada persatuan jang kuat daripada nasion, daripada Rakjat pekerdja, daripada buruh dan tani, daripada klas buruh, dan daripada kaum Komunis. Hanya dengan persatuan kuat jang demikian itu, kemenang-

an sepenuhnya atas imperialisme dan feodalisme akan dimahkotai.

Perkuat persatuan nasional dan madju terus mengempur imperialisme dan feodalisme!

(Laporan politik kepada Sidang Pleno ke-II CC PKI pada achir Desember 1960)

**Pengantar diskusi untuk memperkuat
statement Politbiro CC PKI mengenai
Pen. Pres. No. 7/1959**

/Njono

Kawan²,

Dalam Laporan Politik Kawan Ketua D.N. Aidit telah dikemukakan, bahwa Sidang Pleno Ke-II CC bertugas mendiskusikan sikap PKI mengenai Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang sjarat² dan penjederhanaan kepartaian dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai², jang antara lain mewadjibkan partai² „menjelaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing² dengan ketentuan² pasal² 3, 4, 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.” Kepada Sidang Pleno Ke-II CC diusulkan untuk memperkuat sikap jang sudah diambil oleh Politbiro dan untuk merumuskan amandemen² terhadap Konstitusi dan Program Partai guna memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959.

Sikap Politbiro itu telah dinjatakan dalam Statement Politbiro CC PKI jang dikeluarkan pada tgl. 5 September 1960 jang menjelaskan, bahwa untuk memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959, Pasal 3, bagi PKI tidaklah mempunyai keberatan apa² untuk menjatakan dengan tegas, bahwa PKI menerima dan mempertahankan UUD '45 dan „Pantjasila”.

Bahwa PKI tidak mempunyai keberatan apa² untuk memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959, hal ini sesungguhnya mudah dimengerti. Sudah sedjak masih berko-

barnja Revolusi Agustus '45, PKI telah menerima dan mempertahankan UUD '45 sebagai alat perjuangang jang penting dalam mempersatukan seluruh Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Sikap PKI ini dikemukakan lagi pada sidang² terakhir Madjelis Konstituante dan pada waktu Presiden Sukarno, setelah kegagalan Konstituante, mendekritkan berlakunja kembali UUD '45. Sikap ini dipertegas dalam Resolusi Kongres Nasional Ke-VI PKI tentang „PKI Menerima UUD '45 dan Pantjasila Untuk Memperkuat Front Nasional dan Mentjapai Masyarakat Adil dan Makmur”.

Djika diteliti kembali, maka dalam Pembukaan UUD '45 ternyata tidak hanya dimuat dasar² Negara, djuga dimuat pernyataan tentang hasrat² Rakjat Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hasrat² Rakjat inilah jang telah menggugah dan membangkitkan Rakjat Indonesia mengorbankan jiwa dan raganja, hartabenda dan putera-puterinja untuk penyelesaian Revolusi Agustus '45. Oleh Presiden Sukarno hasrat² Rakjat Indonesia itu dinamakan Amanat Penderitaan Rakjat jang menuntut penyelesaian Revolusi Indonesia jang bersasaran melikwidasi imperialisme dan sisa² feodalisme, dan bertudjuan membangun kehidupan demokratis jang berpemerintahan kegotongrojongan nasional dan berharidepan Sosialisme.

Dengan pertimbangan² ini, untuk memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959, Pasal 3, Politbiro mengusulkan kepada Sidang Pleno Ke-II CC untuk mengambil keputusan², disamping menegaskan, bahwa Preambul dan pasal² peraturan Konstitusi PKI, masing² adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, menjisipkan dalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI, halaman 63, antara alinea 1 dan alinea 2, tambahan kalimat sbb. :

„PKI menerima dan mempertahankan UUD '45, iaitu Undang² Dasar Negara Republik Indonesia jang dalam

Pembukaannya memuat hasrat Rakyat Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan memuat Pantjasila sebagai dasar² negara; bertudjuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, dan berdasarkan program kerdjanja pada Manifesto Politik Republik Indonesia serta perintjiannya yang sudah ditetapkan oleh Sidang Pertama MPRS tanggal 19 November 1960 sebagai Garis² Besar Haluan Negara Republik Indonesia."

Dengan maksud, mentjoba melemahkan Partai dan memetjahkan front persatuan nasional, kaum imperialis dan kaum reaksioner lainnya, baik yang lama maupun baru, sudah dan akan terus membuat fitnahan² terhadap Partai dengan membuat matjam² dongengan yang bukan², antara lain dengan menjatakan, bahwa PKI tidak setudju kepada „djalan² damai dan demokratis" sebagaimana ditjantumkan dalam Penpres No. 7 Tahun 1959, pasal 4.

Kita telah kenal baik watak klas daripada kaum imperialis dan kaum reaksioner. Mereka selalu mentjoba menjembunikan kenjataan² yang benar untuk menutupi kedjahatan² mereka sendiri. Bukankah soal „djalan² damai dan demokratis" sudah lama bukan merupakan soal lagi bagi Partai kita? Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI telah menjatakan dengan se-djelas²nja bahwa :

„..... adalah satu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakyat sebagai tingkat peralihan ke Sosialisme di Indonesia ditjapai dengan djalan damai, djalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berdjung untuk mendjadikan kemungkinan ini suatu kenjataan. Djika bergantung kepada PKI, djalan damai, djalan parlementer inilah yang dipilih".

Sedjarah perdjjuangan Rakyat dalam abad ke-20 ini tjukup banjak memberikan bukti², bahwa imperialisme-lah sumber sosial yang utama dari segala kekerasan

reaksioner yang menimbulkan matjam² malapetaka bagi Rakyat² diberbagai negeri.

Mengenai „Pantjasila" kita tidak hanja menghadapi fitnahan² dan penipuan² dari kaum imperialis dan kaum reaksioner. Kita djuga menghadapi matjam² tafsiran. Tafsiran² ini ada yang dibuat dengan maksud baik, ada djuga yang dibuat dengan maksud djahat. Tugas kita adalah, berlandaskan „Pantjasila", senantiasa memper-teguh persatuan nasional, dan bersamaan dengan itu dengan ulet, gigih dan pandai kita harus memperdjungkan supaya „Pantjasila" ditafsirkan yang benar sesuai dengan pengertian² yang benar mengenai soal² pokok Revolusi Indonesia yang telah diuraikan dengan djelas dalam Manipol.

Kita berpendapat, bahwa pedoman dalam mengartikan „Pantjasila" adalah — penegasan² Presiden Sukarno yang terutama telah dinjatakan dalam Pidato „Lahirnja Pantjasila" tanggal 1 Djuni 1945 dan Pidato Presiden dimuka Madjelis Umum PBB tanggal 30 September 1960 „Membangun Dunia Kembali".

Dalam Pidato „Lahirnja Pantjasila" yang bersedjarah itu, Presiden Sukarno mendjelaskan hal² pokok sbp. :

Pertama : Mengenai Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, dikemukakan :

„Prinsip Ketuhanan ! Hendaknja Negara Indonesia ialah negara — jang tiap² orangnja dapat meniembah Tuhannya dengan tjara leluasa tiada 'egoisme-agama' Marilah kita amal-kan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu ? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah — memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama² lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita didalam Indonesia Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan : bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah

ke-Tuhanan jang berkebudajaan, ke-Tuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, ke-Tuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain

Kedua : Mengenai Sila Kebangsaan, dikemukakan :
„Dasar pertama, jang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia Satu Nationale Staat !..... Kebangsaan Indonesia jang bulat ! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain², tetapi kebangsaan Indonesia Kebangsaan jang kita andjurkan bukan kebangsaan jang menjendiri, bukan chauvinisme Djangan kita berdiri diatas azas demikian, tuan², djangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah jang terbagus dan termulja, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan sadja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa²”.

Ketiga : Mengenai Sila Kedaulatan Rakjat, dikemukakan :

..... ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua', 'satu buat semua, semua buat satu'. Saja yakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”.

Keempat : Mengenai Sila Kemanusiaan, dikemukakan :
..... saja usulkan kepada tuan², jang boleh saja namakan 'internasionalisme'. Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitisme, jang tidak mau adanja kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain²nja. Internasionalisme tidak dapat hi-

dup subur kalau tidak berakar didalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme”.

Kelima : Mengenai Sila Keadilan Sosial, dikemukakan :

..... prinsip kesedjahteraan, prinsip : tidak akan ada kemiskinan didalam Indonesia Merdeka..... Apakah kita mau Indonesia Merdeka, jang kaum kapitalnja meradjalela, ataukah jang semua Rakjat sedjahtera, jang semua orang tjukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanya ? Mana jang kita pilih, saudara² ?..... Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan jang memberi hidup, yakni politik-ekonomische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial !”

Mengenai intisari daripada „Pantjasila”, dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam Pidato „Lahirnja Pantjasila” tsb. — bahwa :

..... kita mendirikan Negara Indonesia, jang kita semua harus mendukungnja. Semua buat semua ! Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga, dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan gotong-rojong. Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara gotong-rojong ! Alangkah hebatnja ! Negara gotong-rojong !”

Dalam Pidato Presiden dimuka Madjelis Umum PBB antara lain didjelaskan :

Bahwa, Bangsa Indonesia meliputi „orang² jang menganut berbagai matjam agama : ada jang Islam, ada jang kristen, ada jang Buddha dan ada jang tidak menganut sesuatu agama”, dan bahwa „mereka jang tidak pertjaja kepada Tuhanpun, karena toleransinja jang mendjadi pembawaannja mengakui bahwa kepertjajaan kepada Jang Maha Kuasa merupakan karakteristik da-

ri bangsanja, sehingga mereka menerima Sila pertama ini”;

Bahwa, nasionalisme di Barat adalah „kakek dari imperialisme, jang bapaknja adalah kapitalisme”, dan di Asia, Afrika dan Latin-Amerika „nasionalisme adalah gerakan pembebasan, suatu gerakan protes terhadap imperialisme dan kolonialisme, dan suatu djawaban terhadap penindasan nasionalisme-chauvinis jang ber-sumber di Eropah”;

Bahwa, internasionalisme adalah „pernyataan dari nasionalisme jang sedjati, dimana setiap bangsa menghargai dan mendjaga hak² semua bangsa, baik jang besar maupun jang ketjil, jang lama maupun jang baru”, dan bahwa „internasionalisme akan berarti berachirnja imperialisme dan kolonialisme, sehingga dengan demikian berachirnja banjak bahaya dan ketegangan”.

Bahwa, demokrasi itu „bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan-sosial Barat”, dan „bagi kami bangsa Indonesia, demokrasi mengandung tiga unsur jang pokok. Demokrasi mengandung per-tama² prinsip jang kami sebut **Mufakat** yakni: kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi mengandung prinsip **Perwakilan**. Achirnja demokrasi mengandung, bagi kami, prinsip **Musjawarah**. Ja, demokrasi Indonesia mengandung ketiga prinsip itu”, dan

Bahwa, keadilan sosial itu tidak dapat dipisahkan dari kemakmuran sosial dan „menerima prinsip ini akan berarti menolak kolonialisme dan imperialisme”, djuga berarti „mengachiri banjak dari kedjahatan² sosial, jang menjusahkan dunia kita”.

Kawan²,

Demikianlah beberapa segi penting dalam pelaksanaan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960. Mengenai sjarat² lainnja, misalnja mengenai djumlah tjabang dan anggota, tidak diperbolehkannja mempunjai seorang asingpun dalam Pengurus dan Pengurus Penghormatan, jang mendjadi

anggota partai ialah warga-negara Indonesia dll.-nja tidak ada jang mendjadi persoalan, karena semuanya sudah ditampung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKI. Hanja perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa jang termasuk dalam organisasi² lain jang mendukung dan/atau bernaung dibawah partai sebagaimana disebutkan dalam Penpres No. 7 Tahun 1959, Pasal 3, ayat (2), adalah organisasi massa „Pemuda-Rakjat” sebagaimana tertjantum dalam Anggaran Rumah Tangga (fasal² peraturan Konstitusi) PKI, Bab X.

Bersama Rakjat dan semua Partai dan Organisasi jang demokratis, marilah kita usahakan sekuat tenaga, supaya pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960 menguntungkan Rakjat dan kehidupan demokrasinja!

(diutjapkan didepan Sidang Pleno ke-II CC PKI pada achir Desember 1960)

Keputusan²

Sidang Pleno Ke-II CC PKI

RESOLUSI SIDANG PLENO KE-II CC PKI MENGENAI LAPORAN POLITIK POLITBIRO

Sidang Pleno Ke-II CC PKI, yang berlangsung di Djakarta pada akhir tahun 1960, yaitu pada tanggal 30 dan 31 Desember 1960, setelah mendengar dan mendiskusikan Laporan Politik Politbiro yang berjudul „*Madju Terus Menggempur Imperialisme Dan Feodalisme*“, yang disampaikan oleh Ketua Partai, Kawan D.N. Aidit, memutuskan menerima Laporan Politik itu sebagai garis kebidaksanaan dan pedoman aktivitas Partai di-waktu² yang akan datang.

Sidang Pleno menjerukan kepada semua Komunis dan kaum progresif lainnja untuk mempeladjar baik² Laporan Politik tersebut dan mengamalkannja didalam praktek.

Sidang Pleno Ke-II CC PKI

Djakarta, akhir Desember 1960

STATEMENT CC PKI TENTANG MEMPERKUAT SIKAP POLITBIRO CC PKI TERHADAP PENETAPAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1959

Sidang Pleno ke-II CC PKI yang bersidang di Djakarta pada tanggal 30 dan 31 Desember 1960, sesuai dengan hasil pembitjaraan antara Peperti/Presiden Sukarno dengan pemimpin² Nasakom pada tanggal 23 November 1960, dimana tegas dikatakan oleh Peperti/Presiden Sukarno bahwa untuk memenuhi Penpres 7 tidak perlu Kongres khusus, memutuskan : membatalkan Kongres Nasional ke-VII Luarbiasa PKI. Dan kongres yang akan datang adalah kongres periodik.

Selandjutnja, mengingat Penpres No. 7 tahun 1959, Pasal 3 beserta pendjelasannja, dan memperhatikan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, Pasal 1, Sidang Pleno ke-II CC PKI menjatakan, bahwa sudah sedjak Revolusi Agustus 1945 PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 sebagai alat perjuangannja yang penting dalam mempersatukan seluruh Rakjat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Sikap PKI ini dikemukakan lagi pada sidang² terachir madjelis Konstituante dan pada waktu Presiden Sukarno, setelah kegagalan Konstituante, mendekritkan berlakunja kembali UUD 1945, serta dinjatakan dalam Resolusi Kongres Nasional ke-VI PKI tentang „PKI menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk memperkuat Front Nasional dan Menjapai Masyarakat Adil dan Makmur“.

Dengan pertimbangan² ini, Sidang Pleno ke-II CC PKI memperkuat Statement Politbiro CC PKI tertanggal 5 September 1960 mengenai Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959.

Berhubung dengan adanja matjam² tafsiran mengenai Pantjasila, PKI berpendapat, bahwa pedoman dalam

mengartikan Pantjasila adalah penegasan² yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam pidato „*Lahirnja Pantjasila*” tanggal 1 Djuni 1945 dan pidato Presiden dimuka Madjelis Umum PBB tanggal 30 September 1960 „*Membangun Dunia Kembali*”.

Untuk memenuhi ketentuan² Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960, Sidang Pleno ke-II CC PKI mengambil keputusan² sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa Preambul dan fasal² peraturan² Konstitusi PKI, masing² adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2. Menjispkan dalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI, halaman 63, antara alinea 1 dan alinea 2, tambahan kalimat sebagai berikut :

„PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 ja-itu Undang² Dasar Negara Republik Indonesia, yang dalam Pembukaannya memuat hasrat² Rakjat Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan memuat *Pantjasila* sebagai dasar² Negara, bertudjuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia, dan mendasarkan program kerdjanja pada Manifesto Politik Republik Indonesia serta perintjiannya yang sudah ditetapkan oleh Sidang Pertama MPRS tanggal 19 November 1960 sebagai Garis² Besar Haluan Negara Republik Indonesia”.

3. Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI, halaman 60 kalimat terachir hendaknja dibatja sebagai berikut :

Pemerintah Demokrasi Rakjat bukanlah kekuasaan proletariat, melainkan kekuasaan Rakjat, ialah kekuasaan bersama dari semua klas revolusioner anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan seterusnya.

4. Menegaskan bahwa yang termasuk dalam organisasi² lain yang mendukung dan/atau bernaung dibawah

Partai sebagaimana disebutkan dalam Penpres 7/1959, fasal 3, ayat (2), adalah organisasi massa „Pemuda Rakjat” sebagaimana tertjantum dalam Anggaran Rumah Tangga (fasal² peraturan Konstitusi) PKI, Bab X.

Sidang Pleno ke-II CC PKI

Djakarta, achir Desember 1960

RESOLUSI TENTANG PERNJATAAN DAN SERUAN PERTEMUAN WAKIL² 81 PARTAI KOMUNIS DAN BURUH DI MOSKOW

Sidang Pleno ke-II Comite Central Partai Komunis Indonesia yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 30-31 Desember 1960, setelah mendengarkan laporan Kawan M. H. Lukman, Ketua delegasi Partai Komunis Indonesia keperajaan ulangtahun ke-43 Revolusi Sosial Oktober Besar, yang kemudian djuga menghadiri Pertemuan wakil² 81 Partai² Komunis dan Buruh di Moskow, menjatakan persetudjuan sepenuhnya atas pekerdjaan delegasi dalam Pertemuan tersebut.

Setelah mempeladjar dan mendiskusikan setjara dalam seluruh isi Pernjataan dan Seruan yang dihasilkan oleh Pertemuan, Sidang Pleno ke-II CC menegaskan dukungan sepenuhnya atas Pernjataan dan Seruan tersebut.

Kenjataan bahwa wakil² dari 81 Partai² Komunis dan Buruh dari lima benua yang mewakili 36 djuta Komunis, yang dengan suara bulat, melalui diskusi, berhasil menjapai kesimpulan² yang sama mengenai masalah² internasional yang dihadapi bersama oleh gerakan Komunis sedunia, menundjukkan vitalitet yang tiada taranja daripada Marxisme-Leninisme dan kekuatan persatuan yang

taktergojahkan dari gerakan Komunis sedunia. Hasil gemilang dari diskusi yang paling demokratis ini merupakan pukulan yang keras bagi kaum imperialis dan kaum reaksioner lainnja yang menginginkan dan dengan segala matjam djalan mentjoba menimbulkan perpetjahan dalam gerakan Komunis sedunia.

Dokumen² itu merupakan penjimpulan Marxis-Leninis yang kreatif atas pengalaman² perdjjuangan klas buruh dan Rakjat pekerdja sedunia untuk perdamaian, pembebasan nasional, perbaikan tingkat hidup, demokrasi dan Sosialisme. Pernyataan memberikan analisa yang mendalam dan terang tentang perkembangan imbalanced kekuatan² klas didunia selama masa² tahun belakangan ini. Pernyataan mendjelaskan masalah² yang urgen dan mendesak yang dihadapi oleh gerakan Komunis dan Rakjat progresif diseluruh dunia dan menundjukkan kepada Partai² Komunis dan Buruh, kepada klas buruh dan semua kekuatan progresif disemua negeri djalan menudju kemenangan dalam perdjjuangan bersama mereka.

Sidang Pleno ke-II menggarisbawahi apa yang telah ditegaskan oleh Pernyataan mengenai zaman kita, yang isi pokoknja ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme, yang dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar, dan merupakan zaman perdjjuangan antara dua sistim sosial yang berlawanan, zaman revolusi sosialis dan revolusi pembebasan nasional, zaman keruntuhan imperialisme, pelenjapan sistim kolonial, zaman lebih banyak Rakjat beralih kedjalan sosialis, zaman kemenangan Sosialisme dan Komunisme yang meliputi seluruh dunia. Dengan tepat sekali ditundjukkan oleh Pernyataan bahwa tjiri-utama dari zaman kita ini ialah bahwa sistim Sosialis dunia sedang mendjadi faktor menentukan dalam perkembangan masjarakat, dan bahwa taraf baru telah mulai dalam perkembangan krisis umum kapitalisme.

Pernyataan dengan djelas menguraikan kemenangan²

besar dalam segala lapangan yang ditjapai oleh kubu sosialis yang merupakan persekutuan hidup sosial, ekonomi dan politik dari Rakjat² yang bebas dan berdaulat, yang dipersatukan oleh ikatan setiakawan Sosialis internasional yang erat, oleh kesamaan kepentingan dan tudjuan bersama, dan menempuh djalan Sosialisme dan Komunisme. Dengan pasti dinjatakan bahwa restorasi kapitalisme telah dibikin tidak mungkin setjara sosial dan ekonomi bukan hanya di Uni Sovjet, tetapi djuga di-negeri² sosialis lainnja.

Tentang masalah perang dan damai yang dewasa ini merupakan masalah yang paling hangat, Pernyataan memperingatkan supaja Rakjat² lebih waspada lagi daripada diwaktu yang sudah². Ditegaskan bahwa selama masih ada imperialisme, selama itu akan ada tanah persembaian untuk peperangan², agresi, dan bahwa watak agresif daripada imperialisme tetap tidak berubah. Karena itu, bahaya perang dunia baru masih belum lenjap. Dalam hubungan ini ditundjukkan, bahwa imperialisme AS adalah kekuatan agresi dan perang yang utama. Tetapi dalam pada itu kedua dokumen menjatakan bahwa telah terbentuk kekuatan² njata yang mampu menggagalkan rentjana² agresi imperialis. Ditegaskan bahwa perang dunia dapat ditjegah oleh usaha² bersama kubu sosialis dunia, klas buruh internasional, gerakan pembebasan nasional, semua negeri yang menentang perang dan semua kekuatan tjintadamai. Dan bahwa perdjjuangan menentang antjaman perang baru harus didjalkan sekarang djuga, tidak menunggu sampai bom² atom dan hidrogen mulai berdjatuhan. Dalam hubungan ini dinjatakan, bahwa pelaksanaan program perlutjutan sendjata setjara umum dan mutlak yang diadjudkan oleh Uni Sovjet akan mempunjai artipenting bersedjarah bagi umatmanusia, dan bahwa untuk merealisasi program ini mutlak diperlukan perdjjuangan yang aktif dan gigih menentang kekuatan² imperialis yang agresif. Selanjutnja ditegaskan bahwa kemenangan Sosialisme

diseluruh dunia akan melenjapkan se-habis²nja sebab-musabab sosial dan nasional dari segala peperangan.

Mengenai koeksistensi setjara damai jang merupakan prinsip hubungan internasional jang paling tepat dan masukakal dalam dunia sekarang jang terbagi dalam dua sistim, dinjatakan bahwa politik koeksistensi setjara damai memenuhi kepentingan² azasi semua Rakjat, bahwa ia adalah politik memobilisasi massa dan melantjar-kan aksi jang giat menentang musuh² perdamaian. Dju-ga ditegaskan bahwa koeksistensi setjara damai dian-tara negara² tidak berarti mendamaikan ideologi sosialis dengan ideologi burdjuis, tidak berarti pengingkaran perdjuaan klas sebagaimana dinjatakan oleh kaum revisionis.

Sidang Pleno ke-II CC berpendapat bahwa kesim-pulan² dan penilaian Pernyataan mengenai kemenangan revolusi² pembebasan nasional sangat tepat. Dinjatakan bahwa kehantjuran kolonialisme sepenuhnya tidak dapat dielakkan. Dilihat dari arti sedjarahnja, keruntuhan sis-tim perbudakan kolonial karena pukulan gerakan pem-bebasan nasional adalah perkembangan nomor dua pen-tingnja sesudah terbentuknja sistim sosialis dunia.

Pernyataan menundjukkan bahwa tugas urgen dari kebangunan nasional di-negeri² jang melemparkan pe-nindasan kolonial dapat dilaksanakan setjara berhasil-hanja dengan perdjuaan tegas melawan imperialisme dan sisa² feodalisme, dengan djalan menjatukan semua-kekuatan patriotik bangsa dalam front persatuan na-sional demokratis. Dengan ini djelaslah betapa tepatnja politik PKI jang dengan teguh mendjalankan front per-satuan dengan kaum nasionalis pada umumnja dan pada waktu sekarang, dalam bentuk kongkritnja, jalah mem-perkuat persatuan Nasakom.

Dalam hubungan perdjuaan melaksanakan tugas² urgen dari kebangunan nasional, Pernyataan menun-djukkan bahwa benteng pokok kolonialisme modern adalah Amerika Serikat. Kaum imperialis jang dikepalai

oleh AS berusaha mati²an dengan tjara² baru dan ben-tuk² baru mempertahankan penghisapan kolonial ter-hadap Rakjat² bekas negeri² djadjahan.

Pernyataan menundjukkan bahwa dalam keadaan se-djarah sekarang ini, dibanjak negeri sedang timbul sja-rat² dalamnegeri dan internasional jang menguntungkan pembentukan negara demokrasi nasional jang merdeka, jaitu negara jang setjara konsekwen mempertahankan kemerdekaan ekonomi dan politiknya, jang berdjuaan melawan imperialisme dan blok² militernja, melawan pangkalan² militer diwilajahnja; negara jang berdjuaan melawan bentuk² baru kolonialisme dan penjusupan kapital imperialis; negara jang menolak tjara memerintah jang diktatorial dan lalim; negara dimana bagi Rak-jat terdjamin hak² dan kebebasan² demokratis jang luas (kebebasan² berbitjara, pers, berkumpul, berdemonstra-si, membentuk partai² politik dan organisasi² masjara-kat), kesempatan bekerdja untuk memperdjuaan pe-laksanaan perubahan² agraria dan perubahan² sosial dan demokratis lainnja, serta untuk ambilbagian dalam menentukan politik pemerintah. Keterangan ini, disam-ping merupakan suatu pembenaran, sudah tentu djuga merupakan dorongan bagi perdjuaan Rakjat Indonesia untuk membangun kehidupan demokratis dengan peme-rintahan jang berdasarkan kegotongrojongan nasional dan berharidepan Sosialisme.

Dengan tepat sekali Pernyataan menekankan bahwa memilih sesuatu sistim masjarakat adalah hak jang tak dapat dirampas dari Rakjat masing² negeri, dan bahwa revolusi Sosialis tidak dapat diimport, djuga tidak dapat dipaksakan dari luar. Adalah sepenuhnya sesuai dengan kenjataan hidup bahwa kaum Komunis menentang ex-port revolusi, disamping menentang keras pula export kontra-revolusi seperti jang dilakukan oleh kaum impe-rialis dengan menggunakan kaum reaksioner dalam-negeri untuk menimbulkan pemberontakan² kontra-revolusioner DI-TII dan PRRI-Permesta di Indonesia.

Sidang Pleno ke-II CC memberikan penekanan² pada masalah² yang penting sekali bagi kehidupan gerakan Komunis sedunia, seperti masalah persatuan di-masing² Partai Marxis-Leninis dan diantara klas buruh internasional, yang diuraikan dengan terang dan tegas dalam Pernyataan. Sesuai dengan keadaan sedjarah sekarang, gerakan Komunis sedunia telah menjadi kekuatan politik yang paling berpengaruh dari zaman kita, faktor terpenting dari kemajuan masyarakat.

Pernyataan menunjukkan bahwa kepentingan perkembangan selanjutnya dari gerakan Komunis dan klas buruh menuntut diteruskannya perjuangan yang gigih pada dua front, yaitu melawan revisionisme yang tetap merupakan bahaya utama, dan melawan dogmatisme dan sektarisme.

Dalam hubungan dengan perjuangan melawan revisionisme modern, Pernyataan menegaskan pendirian Partai² Komunis yang setjara bulat mengutuk oportunisme internasional matjam Jugoslavia, suatu matjam pendjelmaan yang terkonsentrasi dari „teori²“ revisionis modern. Itulah sebabnya Pernyataan dan Seruan merupakan juga pukulan yang keras terhadap revisionisme modern dari Liga Komunis Jugoslavia (LKJ). Sebagaimana diketahui, bertentangan dengan semangat Rakjat Jugoslavia yang anti-imperialis dan pro-Sosialisme, pemimpin² LKJ, seperti baru² ini didjurubitjarai oleh E. Kardelj dalam bukunya „Sosialisme dan Perang“, sama sekali tidak mengkritik, apalagi mengutuk imperialisme, sebaliknya malahan menjerang Sosialisme, sehingga dengan demikian mentjoba menjelamatkan imperialisme. Oleh karena itu seperti ditegaskan dalam Pernyataan, penelanjangan seterusnya terhadap pemimpin² kaum revisionis Jugoslavia dan perjuangan yang aktif untuk melindungi gerakan Komunis serta gerakan klas buruh terhadap ide² anti-Leninis dari kaum revisionis Jugoslavia tetap merupakan tugas wadjib dari Partai² Marxis-Leninis.

Mengenai kedudukan dan hubungan Partai² Komunis dan Buruh, adalah tepat sekali seperti yang ditegaskan dalam Pernyataan bahwa semua Partai Marxis-Leninis adalah bebas dan mempunyai hak sama, mereka menentukan politik²nja berdasarkan sjarat² yang kongkrit di-negerinya masing², dengan berpedoman pada prinsip² Marxisme-Leninisme, dan satusamalah saling menjong. Berhasilnja tjita² klas buruh disesuatu negeri tidak mungkin terdjadi tanpa setiakawan internasional dari semua Partai Marxis-Leninis. Setiap Partai bertanggungjawab kepada klas buruh, kepada Rakjat pekerdja negeri masing², kepada seluruh gerakan klas buruh dan Komunis sedunia. Bersamaan dengan itu ditegaskan bahwa Partai² Komunis dan Buruh dengan bulat menjatakan, bahwa Partai Komunis Uni Sovjet sebagai barisan yang paling berpengalaman dan tergembleng dari gerakan Komunis sedunia, dimasa lampau dan dimasa datang tetap merupakan pelopor gerakan Komunis sedunia yang diakui umum.

Dilapangan ideologi, Pernyataan menunjukkan bahwa menjadi tugas kaum Komunis untuk tidak pasif dan defensif, sebaliknya melantjarkan ofensif tegas di-front ini, yaitu berdjuaug untuk membebaskan massa Rakjat dari segala matjam dan bentuk belenggu spirituil ideologi burdjuis,* termasuk pengaruh reformisme yang djahat, untuk menjebarkan dikalangan Rakjat ide² progresif yang memberikan sumbangan kepada kemajuan sosial, ide² kemerdekaan demokrasi, ideologi Sosialisme ilmiah.

Sidang Pleno ke-II CC berpendapat bahwa kedua dokumen itu akan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong dan menuntun perjuangan untuk mentjapai tudjuan² yang bukan hanya merupakan tudjuan² kaum Komunis tetapi juga tudjuan seluruh Rakjat pekerdja dan seluruh kekuatan demokratis di Indonesia, seperti pembebasan Irian Barat, pelaksanaan perubahan² agraria guna kepentingan kaum tani, pembatasan² kekuasaan

ekonomi imperialis dan pengusirannya dari ekonomi nasional, pembentukan dan pembangunan industri nasional, perbaikan taraf hidup Rakyat, pendemokrasian kehidupan masyarakat, dan sebagainya.

Achirnya Sidang Pleno ke-II CC menganggap penting untuk mewajibkan setiap kader dan anggota Partai serta menjerukan kepada segenap aktivis gerakan Rakyat revolusioner, supaya mempeladjar *Pernjataan* dan *Seruan* dari Pertemuan Partai² Komunis dan Buruh itu, untuk dijadikan senjata dalam perjuangan menyelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai akar²nya dan dalam memperhebat perjuangan lebih lanjut untuk menjelamatkan perdamaian dunia.

Sidang Pleno ke-II
Comite Central
Partai Komunis Indonesia

Djakarta, achir Desember 1960

DENGAN INTI NASAKOM, BERSATU MEM- BEBASKAN IRIAN BARAT

Dalam mendiskusikan Laporan Politik Politbiro CC PKI yang disampaikan oleh Ketua CC PKI, Kawan D.N. Aidit, Sidang Pleno ke-II CC PKI menganggap adil kemarahan dan kutukan Rakyat Indonesia terhadap kekurangadilan pemerintah kolonial Belanda yang untuk meneruskan pendudukannya di Irian Barat telah menambah kekuatan Angkatan Perangnya, melakukan pengedjaran² dan pembunuhan² massal serta membakari desa². Difihak lain Sidang menyatakan salut kepada Rakyat Indonesia di Irian Barat atas perlawanannya yang gagahberani terhadap kelaliman kaum agresor Belanda.

Sahabat² yang sedjati dan yang senantiasa aktif mem-

perkuat perjuangan Rakyat Indonesia untuk pembebasan Irian Barat semakin banjak terdapat disemua pelosok dunia terdiri dari Rakyat² dan pemerintah² dari negeri² Sosialis, gerakan klas buruh disemua negeri, pedjuang² kemerdekaan nasional dan pedjuang² perdamaian yang sedjati diseluruh muka bumi. Dalam barisan ini terdapat kaum Komunis dan orang² progresif lainnya dinegeri Belanda yang untuk kesekian kalinya menuntut penarikan tentara Belanda dari Irian Barat dan penjerahan Irian Barat tanpa sjarat kepada Republik Indonesia, terdapat kaum Komunis dan golongan² anti-kolonial lainnya di Australia dan Amerika Serikat, sekalipun pemerintah²nya menjokong imperialisme Belanda dalam mempertahankan kolonialisme di Irian Barat. Mereka memihak Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat karena hal itu adalah penting bagi perkokohan perdamaian dunia dan bagi penghapusan kolonialisme dari muka bumi.

Dalam hubungan ini Sidang semakin mendalam menjedari luarbiasa pentingnya arti *Pernjataan* dan *Seruan* dari 81 Partai Komunis dan Buruh dalam bulan November 1960 yang baru lalu bagi penghapusan kolonialisme diseluruh dunia, chususnja untuk penghapusan kolonialisme di Irian Barat.

Solidaritet internasional tersebut diatas adalah sangat penting dalam memperkuat perlawanan terhadap imperialisme Belanda yang berkomplot dengan Amerika Serikat dalam menduduki Irian Barat. Tetapi Sidang menekankan bahwa diatas segala-galanya, yang menentukan bagi pembebasan Irian Barat adalah kekuatan Rakyat Indonesia sendiri yang berada didalam maupun diluar daerah Irian Barat, yang bersatu-padu dengan bertintakan Nasakom. Untuk mengembangkan kekuatan ini setjara maksimal diperlukan adanya kebebasan² demokratis yang seluas-luasnya bagi Rakyat, bagi semua partai, organisasi dan orang² yang revolusioner, dan diper-

lukan segera dilaksanakannya mobilisasi umum seperti yang diputuskan oleh MPRS.

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat teristimewa penting sekali soal memobilisasi bantuan kepada Rakjat yang berada di daerah Irian Barat sendiri dalam mengorganisasi diri dalam semua bentuk perlawananannya terhadap pendudukan Belanda. Sedang di daerah kekuasaan R.I. dengan tidak menunggu² lagi Pemerintah supaya mengambil alih sisa² modal Belanda dalam perusahaan² tjampuran, tidak memberikan kompensasi kepada semua modal Belanda yang telah diambil alih, dan supaya menata dengan tegas kepada pemerintah AS bahwa perusahaan² AS akan diperlakukan sama dengan perusahaan² Belanda jika AS terus membantu Belanda dengan senjata baik setjara langsung maupun dengan melalui NATO dan SEATO dalam mempertahankan pendudukan Belanda di Irian Barat.

Sidang mendukung sepenuhnya sikap Presiden Sukarno yang telah memenuhi tuntutan Rakjat Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda, dan mendesak Pemerintah Indonesia supaya melaksanakan semua tuntutan tentang Irian Barat sesuai dengan Manipol, Djarek dan „Membangun Dunia Kembali”.

Kepada segenap Rakjat Indonesia Sidang berseru supaya dengan lebih berani, lebih waspada, lebih pandai dan lebih gigih memperkuat persatuan dan kegotongroyongan nasional, dengan Nasakom sebagai intinya, dan menjiptakan semua syarat bagi pembebasan Irian Barat. Dan kepada kaum Komunis sendiri Sidang menjerukan untuk tetap menjadi teladan dalam semua bentuk perjuangan yang diperlukan, didalam maupun diluar daerah Irian Barat.

Sidang Pleno Ke-II CC PKI

Djakarta, akhir Desember 1960

KUTUK PELEDAKAN BOM ATOM PERANTJIS, BELA PERDAMAIAN!

Pada saat umat manusia dengan penuh harapan menjambut lahirnya Tahunbaru 1961 sebagai tahun yang akan membawa perbaikan² dalam suasana internasional, maka mengepulnya awan² gelap penuh ratjun radiasi ledakan bom atom Perantjis di Sahara adalah sangat bertentangan dengan hasrat damai dan menimbulkan amarah umat manusia dalam memasuki tahun 1961.

Dengan samasekali tidak mengindahkan kepentingan pokok umat manusia serta gelombang aksi² protes Rakjat² tjintadamai sedunia dan khususnya Asia-Afrika, Pemerintah de Gaulle dalam mentjoba mempertahankan „kedajaan” kolonialnya telah meledakkan bom atom untuk ketiga kalinya di Sahara dan dengan demikian menimbulkan rintangan² baru bagi tertjapainya persetujuan internasional mengenai dihentikannya pertjobaan² dan penggunaan senjata² nuklir. Tindakan Pemerintah Perantjis ini dengan terang²an telah mengabaikan keputusan Sidang ke-15 Madjelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember yang mengandjurkan supaya semua negara tidak mengadakan pertjobaan² ledakan bom nuklir.

Perbuatan yang tidak mengenal perikemanusiaan ini membahayakan kehidupan Rakjat² Afrika khususnya dan merupakan tantangan langsung terhadap Rakjat tjintadamai seluruh dunia yang sebagaimana dikostatasi dalam „Seruan Partai² Komunis dan Partai² Buruh kepada Rakjat² Seluruh Dunia” bulan November 1960, sedang merapatkan barisan serta memperkuat usaha²nja untuk menjelamatkan perdamaian dunia.

Sidang Pleno ke-II CC PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 30-31 Desember 1960, menatakan simpatinya yang sedalam-dalamnya kepada Rakjat Aldjazair, yang disamping dengan gagahberani mengangkat senjata untuk pembebasan nasionalnya, kini

djuga dipaksa untuk berdjuaug melawan radiasi maut akibat ledakan bom nuklir dalam wilajahnja.

Sidang Pleno ke-II CC PKI, sesuai dengan tekad Rakjat Indonesia jang dinjatakan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia „agar segala pertjobaan serta pembikinan, segala pemakaian sendjata termonuklir harus distop se-lekas²nja dan dilarang se-keras²nja”, memprotes keras tindakan jang tak berperikemanusiaan Pemerintah kolonial Perantjis.

Sidang Pleno ke-II CC PKI sepenuhnya yakin bahwa perbuatan nekad kaum imperialis Perantjis ini tidak akan dapat mengendorkan perdjuaugan Rakjat sedunia, melainkan sebaliknya malahan akan mempertebal hasrat dan perdjuaugannja agar tahun 1961 dan tahun² seterusnja bersih dari radiasi² atom, serta mendjadi tahun² kemadjuan dan kemenangan kekuatan² perdamaian.

Sidang Pleno ke-II CC PKI menjerukan kepada Pemerintah Indonesia dan segenap Rakjat Indonesia jang tjintadamai dan berperikemanusiaan supaja ber-sama² dengan Rakjat sedunia mengutuk dan memprotes tindakan tak kenal perikemanusiaan Pemerintah kolonial Perantjis.

Sidang Pleno ke-II CC PKI

Djakarta, achir Desember 1960

I S I

Madju terus menggempur imperialisme dan feodalisme./D.N. Aidit 3

Pengantar diskusi untuk memperkuat statement Politbiro CC PKI mengenai Pen. Pres. No. 7 tahun 1959./Njono 28

Keputusan² Sidang Pleno Ke-II CC PKI

Resolusi Sidang Pleno ke-II CC PKI mengenai Laporan Politik Politbiro 36

Statement CC PKI tentang memperkuat sikap Politbiro CC PKI terhadap Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 37

Resolusi tentang Pernyataan dan Seruan Pertemuan Wakil² 81 Partai Komunis dan Buruh di Moskow 39

Dengan inti Nasakom, bersatu membebaskan Irian Barat 46

Kutuk peledakan bom atom Perantjis, bela perdamaian ! 49

**Joop Morriën
Amsterdam**

Rp. 5,-